



PIDATO KETUA DPR RI

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN SIDANG 2020-2021

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

DALAM RANGKA

HARI ULANG TAHUN KE-76 DPR RI

SELASA, 31 AGUSTUS 2021

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Pancasila.

Yang kami hormati,

- Ketua dan Para Wakil Ketua MPR RI,
- Ketua dan Para Wakil Ketua DPD RI,
- Para Wakil Ketua dan Anggota DPR RI,
- Ketua DPR RI ke-15, Bapak Dr. Ir. H. Akbar Tanjung,
- Ketua DPR RI ke-16, Bapak Dr. HR. Agung Laksono,
- Ketua DPR RI ke-17, Bapak Dr. H. Marzuki Alie,
- Ketua DPR RI ke-19, Bapak Dr.H. Ade Komarudin,
- Ketua DPR RI ke-20, Bapak Bambang Susatyo S.E., M.BA,
- Para Ketua Lembaga Negara,
- Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna DPR RI, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun DPR RI yang ke-76.

Pada peringatan kali ini, DPR RI mengambil tema **“DPR RI HEBAT BERSAMA RAKYAT”**.

Dengan tema ini **DPR RI, menegaskan kembali bahwa dengan semangat gotong royong, yang merupakan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekaligus budaya**

bangsa, akan menjadi landasan berpijak dan bintang penuntun bagi DPR RI untuk bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Lembaga Negara lainnya serta berjuang bersama-sama dengan rakyat, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Pada tanggal 29 Agustus 2021, DPR RI merayakan ulang tahun yang ke-76. Dalam rentang usia tersebut, DPR RI telah melalui perjalanan yang panjang dengan 18 periode pemerintahan dan berbagai nama serta bentuk kelembagaan. **DPR RI telah bertransformasi sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi di**

Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Tahun Sidang 2020-2021 merupakan tahun sidang kedua bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang masih diwarnai oleh tantangan dan ujian akibat Pandemi COVID-19. Selama Pandemi ini, kita telah kehilangan 10 orang rekan kita yang telah wafat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya akibat Covid-19, antara lain:

1. Alm. Imam Suroso dari Fraksi PDI Perjuangan;
2. Alm. Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerindra;
3. Alm. Ali Taher Parosong dari Fraksi Partai Amanat Nasional;

4. Alm. Bambang Suryadi dari Fraksi PDI Perjuangan;
5. Alm. Gatot Sudjito dari Fraksi Partai Golkar;
6. Alm. Imran dari Fraksi Partai Gerindra;
7. Alm. Adang Sudrajat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
8. Alm. Jimmy Demianus Ijie dari Fraksi PDI Perjuangan;
9. Alm. John Sifty Mirin dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
10. Almarhumah Hj. Percha Leanpuri dari Fraksi Nasdem.

Marilah kita mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik disisi Allah SWT.

Pandemi menjadi ujian kita bersama dan untuk saling menguatkan semangat persaudaraan nasional, semangat gotong royong agar segera keluar dari Pandemi ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Di dalam kehidupan demokrasi Pancasila, Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan yang bersumber dari jiwa bangsa yaitu Pancasila. Jiwa bangsa Pancasila merupakan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup bergotong

royong, berbudaya inklusif, toleran dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, merupakan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang menghikmati dan menjangkau kebijaksanaan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya dan karakteristik wilayah.

Oleh karena itu, pada usianya yang ke-76 Tahun, DPR RI meneguhkan kembali, sebagai Perwakilan rakyat yang berjiwa gotong royong yaitu kerja bersama, usaha bersama, amal bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, di dalam mewujudkan tujuan bernegara. Dengan jiwa gotong

royong, maka kita mempersatukan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis, maka dilaksanakan prinsip *checks and balances*, setara dan seimbang, antara cabang-cabang kekuasaan negara, dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan UUD NRI 1945.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, menjalankan prinsip *checks and balances* tersebut pada cabang-cabang kekuasaan negara; dimana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diamanatkan oleh UUD NRI 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi konstitusional tersebut dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI dengan

menggunakan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Saat ini, pada usianya yang ke 76 Tahun dan dengan perkembangan di dalam masyarakat, DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya semakin dituntut komitmen kerakyatannya, integritasnya, serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Dalam memenuhi harapan rakyat, yang telah memberikan mandat kepada DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat, maka DPR RI terus menyempurnakan kinerjanya dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta semakin mawas diri

dalam membawa kedudukan dan kehormatannya sebagai anggota DPR RI.

Hanya Anggota DPR RI yang dapat menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga DPR RI. Oleh karena itu, seluruh anggota DPR RI semakin dituntut agar dapat memperlihatkan kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat, melalui pembentukan Undang Undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, politik anggaran yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, melakukan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional, serta melaksanakan politik diplomasi yang dapat menjaga kepentingan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Telah 2 kali Hari Ulang Tahun DPR RI, diperingati dalam situasi Pandemi Covid-19. Pandemi yang telah berdampak sangat luas dalam kehidupan rakyat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.

Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara untuk menghadapi krisis, oleh karena itu berbagai upaya dan kebijakan pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung berbagai upaya, kebijakan, dan program pemerintahan negara dalam menyelamatkan rakyat menghadapi pandemi dan dampaknya.

DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah agar terus

meningkatkan kinerjanya dalam penanganan pandemi, yang diperlihatkan melalui koordinasi kebijakan yang semakin solid, implementasi pelaksanaan penanganan pandemi yang bersinergi, dan penanganan urusan rakyat terdampak pandemi yang semakin efektif.

DPR RI, dalam menghadapi situasi pandemi, terus melakukan upaya terbaik agar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. Pembatasan kehadiran secara fisik didalam rapat-rapat DPR RI, dioptimalkan agar tidak mengurangi kualitas substansi dalam pembentukan Undang Undang, pembahasan anggaran negara,

pengawasan kinerja pemerintah, serta pelaksanaan diplomasi.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, **DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, yang menargetkan 246 RUU dan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.** Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang Undang yang disusun secara terencana, terbuka dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Dalam pembahasan membentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat,

pandangan, kondisi, situasi serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu dalam pembahasan suatu Undang Undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi Undang Undang yang dibahas.

DPR RI dalam menjalankan politik legislasi tetap berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara; Sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

DPR RI dalam menjalankan politik legislasi juga memperhatikan asas dalam pembentukan

Undang-Undang yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan, sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Secara umum, **Kinerja fungsi legislasi DPR RI pada Tahun Sidang 2020-2021** antara lain:

- **9 (*sembilan*) RUU, telah disahkan menjadi undang-undang (UU).**
- **14 (*empat belas*) RUU, sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I; dan**

- **17 (*tujuh belas*) RUU, sedang dalam tahap penyusunan.**

Di tengah situasi Pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang merupakan *Omnibus Law* pertama di Indonesia, yang diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural di Negara kita.

Berkaitan dengan perkara pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi, sepanjang Tahun Sidang 2020-2021, terdapat 79 (*tujuh puluh sembilan*) perkara pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, dari

jumlah tersebut, **hanya 5 (*lima*) perkara yang putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara.**

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Politik Anggaran yang dilaksanakan DPR RI melalui Komisi dan AKD terkait, diarahkan untuk meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran.

DPR RI dapat memahami kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat perkembangan Pandemi Covid-19. Pemerintah agar dapat mengelola APBN yang semakin berkualitas dalam penanganan Pandemi dan dampaknya, tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada rakyat, dan menjalankan program strategis nasional secara selektif dan prioritas.

Pada APBN Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Negara mengalami tekanan akibat dampak pandemi pada aktivitas perekonomian; Belanja negara mengalami tambahan kebutuhan anggaran untuk penguatan bidang

kesehatan, bidang perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional; Dua hal tersebut mengakibatkan APBN bertumpu pada pembiayaan melalui utang, yang tidak dapat dihindarkan, dan juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI.

Dalam kondisi APBN yang demikian ini, maka **tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial, bahwa belanja negara pada Kementerian/Lembaga memiliki**

kualitas yang baik dan ditandai dengan efektifitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, DPR RI telah memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk memperkuat APBN kedepan, melalui penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan.

DPR RI dalam Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2022 (yang saat ini sedang dibahas), akan

memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi, **sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap dapat fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas, serta pelayanan umum, dan tidak melakukan *refocusing* berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat.**

Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat aktivitas perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, **Kebijakan fiskal pada tahun 2022** diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.

Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka DPR RI akan memberikan atensi pada upaya Pemerintah dalam *mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara* yang memenuhi kualitas *spending better*.

DPR RI juga akan mengawasi investasi pemerintah yang besar (dalam situasi APBN defisit yang tinggi) agar disertai dengan kebijakan dalam mengoptimalkan manfaat investasi yang akan diperoleh secara ekonomi dan sosial, serta Investasi pemerintah agar dapat memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan *supply chain* industri nasional.

Dalam mengelola Pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang Undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas

perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang.

Dalam kondisi APBN yang semakin dibebani dengan beban pembiayaan, maka diperlukan koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengurangi beban pembiayaan defisit APBN. DPR RI mengapresiasi dan mendukung upaya bersama Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan RI dalam mengembangkan mekanisme kerjasama yang dapat meringankan beban pembiayaan, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dan Pemerintah serta otoritas jasa keuangan, untuk terus

memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor riil.

APBN kedepan, dalam menghadapi ketidakpastian perkembangan Pandemi Covid-19, agar memiliki kemampuan fiskal yang antisipatif dalam menjaga Pemulihan Ekonomi dan Sosial.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan dalam mengawasi kinerja pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan

Pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Tim Pengawas dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, serta kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri, baik dalam rangka reses maupun spesifik.

Walaupun tugas Pengawasan dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan dan pembatasan kehadiran fisik, Komisi dan AKD tetap melakukan tugas konstitusionalnya secara optimal agar tidak mengurangi ketajaman dan kedalaman pengawasan yang dilakukan.

Fungsi Pengawasan DPR RI, difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan dalam menjalankan Undang-Undang, Kebijakan, Program, dan Kegiatan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat disegala bidang.

Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI dengan menggunakan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dalam menggunakan hak politiknya tersebut, Anggota DPR RI selalu disertai dengan dinamika perbedaan pendapat dan pandangan terhadap berbagai permasalahan pengawasan. Apapun perbedaan dan dinamika yang berkembang, DPR RI tetap berpegang pada tata

kelola berdemokrasi yang telah kita sepakati bersama di dalam UU MD3 dan tata tertib DPR RI, sebagai komitmen bersama dalam menjalankan demokrasi yang semakin maju dan berkeadaban.

Meski dengan berbagai perbedaan dan dinamika yang tinggi, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI tetap mengutamakan kerja bersama dalam mempersatukan rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa.

Anggota Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

Keberadaan Tim Pengawas dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan, baik yang dihasilkan oleh Pemerintah maupun oleh DPR RI sehingga dapat dipastikan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai dengan Tahun Sidang ini, terdapat 9 Tim Pengawas/Pemantau yang masih ditugaskan dan 45 Panja Pengawasan yang dibentuk oleh DPR RI; 21 Panja Pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya.

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Lawan

COVID-19 (Satgas COVID-19), yang bertujuan untuk memberikan respons cepat terhadap masukan dan aspirasi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan Satgas COVID-19 antara lain:

- melakukan inspeksi Kantor BPOM Pemantauan dan Pengujian Vaksin COVID-19 untuk percepatan penanganan COVID-19;
- kunjungan ke Asrama Haji Pondok Gede dan Rumah Sakit Pusat Pertamina Modular Khusus COVID-19 guna memastikan kesiapan untuk beroperasi sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19,

- kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan mahasiswa dalam penyelenggaraan vaksinasi guna mempercepat program vaksinasi ke pelosok masyarakat.

Fungsi pengawasan DPR RI juga dilakukan melalui pemberian persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan atau pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non pejabat publik.

Pejabat publik yang telah selesai proses pembahasannya, antara lain:

- Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

- Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Periode 2020-2025;
- Calon Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025;
- Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;
- Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026;
- Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung RI;
- Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;

- Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2021-2025;
- Calon Kapolri;
- 33 (*tiga puluh tiga*) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional; serta
- 27 (*dua puluh tujuh*) Calon Duta Besar LBBP negara sahabat untuk RI.

Selain itu, DPR RI telah menyelesaikan proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan terhadap 7 (*tujuh*) atlet yang mendukung Tim Nasional dalam beberapa cabang olahraga.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

DPR RI turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di fora internasional yang juga merupakan salah satu mandat yang harus dijalankan DPR RI, yaitu melalui peran diplomasi parlemen.

Melalui berbagai aktivitas diplomasi parlemen tersebut DPR RI menyuarakan dan memperjuangkan pandangannya atas berbagai isu internasional, terutama yang berkaitan dengan:

- Penanganan Pandemi COVID-19;
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);

- Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
- Stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan;
- *Drug-Free Zone ASEAN*; dan
- Kemerdekaan Palestina.

DPR RI juga secara aktif mengisi posisi-posisi penting di sejumlah organisasi internasional, sehingga dapat mengambil peran yang lebih strategis. Saat ini beberapa delegasi DPR RI dipercaya untuk menjabat sebagai:

- *Anggota IPU Standing Committee on Democracy and Human Rights Bureau,*
- *Presiden Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC),*

- *Women Political Leaders Country Ambassador to the Republic of Indonesia, dan*
- *Anggota IPU Bureau of Women Parliamentarians.*

Sidang Dewan yang Terhormat,

Hadirin yang mulia,

DPR RI merupakan lembaga yang berisikan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Walaupun anggota DPR RI dapat silih berganti, akan tetapi tugas konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD NRI 1945 tidak berganti.

Menjadi tugas Anggota DPR RI pada masa aktifnya, untuk mengisi fungsi konstitusionalnya, agar dapat memberi kemajuan dalam mencapai tujuan bernegara.

Saat ini sejarah telah memberikan kesempatan kepada Yang Terhormat Bapak Ibu Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024, untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Mari gunakanlah panggilan sejarah ini, agar kita, menjadi Anggota DPR RI yang memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara.

Demikian pidato penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020–2021 pada Rapat

Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan dan kerja sama selama satu tahun ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA,

DIRGAHAYU DPR RI

Terima Kasih,
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh;
Om shanti Shanti Shanti Om;
Namo Buddhaya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Dr. (HC) PUAN MAHARANI